

Hiperrasionalisasi Pendidikan Usia Dini Di Indonesia *(Hipperrationalization Of Early Childhood Education In Indonesia)*

Fajriannoor Fanani

(fajrian@usm.ac.id)

(Dosen Ilmu Komunikasi FTIK USM)

Abstrak

Early childhood education starts to growth in Indonesia since the beginning of year 2000. This system growth and change is not only due to the change of parents lifestyle in the contemporary age that asks both husband and wife to works, it's also develop because of the change in values that people have to educate their children. Indonesian people in the contemporary age eventually view the new system permissively and rationalize it as inevitable consequences of modern world. The system is also growth so rational that finally all traditional system in the formal, theoretical, practical, and substantial aspect was left to be change by the new system. This article is trying to comprehend how this hyperrationalization in early childhood education develop in Indonesia.

Kata Kunci:

Pendidikan anak usia dini, Rasionalisasi, Hiperrasionalisasi

Pendahuluan

Model atau sistem tata kelola keluarga yang berkembang di Indonesia kurang lebih sama dengan model keluarga lain di negara berkembang, yaitu paternalistik. Pada model keluarga yang paternalistik ayah atau suami menjadi kepala keluarga yang memiliki peran antara lain sebagai pemimpin keluarga, pemimpin kehidupan beragama dalam keluarga, dan yang paling penting adalah sebagai pencari nafkah. Peran ayah sebagai pencari nafkah menuntut seorang laki-laki berkeluarga untuk beraktifitas diluar rumah demi mendapatkan uang untuk dikelola oleh keluarga. Aktifitas harian seorang ayah yang pergi bekerja pagi dan pulang sore hari atau bahkan malam dianggap sebagai suatu kewajiban karena perannya sebagai pencari nafkah tersebut.

Peran yang berbeda dimiliki oleh seorang istri atau ibu yang menyangg

predikat sebagai pendamping suami. Seorang istri atau ibu secara tradisional tidak dituntut untuk mencari nafkah, sebaliknya seorang perempuan berkeluarga dituntut untuk mampu mengelola kehidupan keseharian keluarganya seperti menjaga kebersihan rumah, kesehatan keluarga, penampilan suami, dan yang paling penting pendidikan anak. Seorang ibu dengan demikian dituntut untuk selalu dekat dengan anak-anaknya dirumah mulai dari sang anak tersebut lahir hingga mereka menikah.

Model keluarga seperti ini bertahan cukup lama hingga akhirnya Indonesia memasuki era kontemporer. Pada masa ini seorang perempuan berpendidikan dianggap memiliki hak yang sama dalam mencari pekerjaan dengan laki-laki. Tekanan perekonomian yang meningkat juga menuntut orang tua, baik ayah maupun ibu, bekerja diluar untuk mencari

nafkah. Peran ibu tetaplah sebagai pengelola domestik rumah tangga yang dipimpin oleh ayah, akan tetapi ibu kini juga bisa memiliki peran lain yaitu membantu keluarga mencari nafkah.

Perubahan atau penambahan peran baru bagi ibu ini memiliki konsekuensi yang menarik. Tuntutan bahwa seorang ibu harus mencurahkan sebagian besar waktunya dirumah untuk membesarkan anaknya kini tidak dapat lagi dipenuhi oleh seorang ibu yang bekerja. Seorang ibu yang bekerja mau tidak mau harus berada diluar rumah selama jam kerja yang berarti mulai dari pagi hingga sore hari. Peran pengasuhan anak yang masih dipikul oleh seorang ibu kini berangsur-angsur mulai didelegasikan pada berbagai lembaga profesional pengasuhan anak.

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, Butir 14, pendidikan usia dini adalah,

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”

Secara resmi sesuai dengan ketentuan pendidikan nasional dikenal empat model pendidikan usia dini, yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) atau Playgroup, Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Paud Sejenis (SPS). Umumnya TK dan KB menawarkan masa belajar perhari yang tidak lama, yaitu antara jam delapan sampai jam 10 atau 11, akan tetapi

dalam praktiknya banyak lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran hingga jam tiga. Rata-rata dari lembaga pendidikan ini bahkan memberikan penawaran penitipan anak usai sekolah tiap jamnya. Diluar program KB dan TK, layanan TPA ini bahkan ditawarkan mulai dari sang anak baru lahir.

Data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 tentang jumlah penyelenggara (sekolah) dan peserta didik KB, TPA, dan SPS menunjukkan satu hal yang menarik dimana jumlah sekolah dan peserta KB, TPA, dan SPS ternyata jauh melebihi jumlah sekolah dan peserta TK.

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Sekolah dan Peserta Didik KB, TPA, SPS, dan TK

	KB, TPA, dan SPS	TK
Sekolah	100.416	74.982
Peserta Didik	6.924.831	4.174.783

Sumber: Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2013/2014. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Statistik Pendidikan Tahun 2014

Tabel tersebut menunjukkan bahwa popularitas dari KB dan TPA telah melebihi TK. Ini menjadi menarik karena TK adalah institusi PAUD yang jauh lebih dulu berdiri dan dikenal oleh masyarakat. Menurut data tersebut semakin banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera mengenyam pendidikan sedini mungkin. Popularitas ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, terutama perubahan gaya hidup masyarakat modern.

Ketersediaan berbagai layanan pendidikan penuh waktu ini mengikuti pola hidup dari ibu modern yang tidak lagi bisa memberikan perhatiannya secara penuh pada anaknya. Pola pengasuhan baru pun lahir dimana pada pagi hari sang Ibu menyerahkan anaknya pada lembaga pendidikan usia dini untuk nanti dijemput baru pada sore harinya. Menariknya, tidak ada tekanan sosial yang berarti pada perubahan model pendidikan tersebut. Sebagian besar masyarakat memaklumi perubahan kondisi tersebut dan tidak menuntut adanya suatu tindakan. Sebagian besar masyarakat Indonesia seolah mengalami apa yang disebut oleh Max Weber sebagai rasionalisasi. Masyarakat Indonesia telah terasionalisasi sehingga tidak lagi memandang perubahan pola pendidikan ini sebagai masalah.

Artikel ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana masyarakat Indonesia mengalami rasionalisasi dalam menjalankan pendidikan anak usia dini. Pola pendidikan yang awalnya berpusat di rumah dan pada seorang sosok ibu kini berubah menjadi berpusat pada berbagai lembaga pendidikan usia dini. Artikel ini mencoba menunjukkan kenapa perubahan pola pendidikan keluarga ini dapat berlangsung dengan mulus tanpa rintangan berarti.

Pembahasan

Rasionalisasi adalah pandangan mengenai karakteristik masyarakat modern. Menurut pandangan ini masyarakat kontemporer mengorganisasikan diri mereka dengan motivasi yang mengacu pada prinsip yang impersonal dan amoral untuk mencapai tujuan mereka (Cohen dalam Turner, 2006: 499). Gagasan mengenai rasionalisasi ini pertama kali dikemukakan oleh Max Weber. Weber berusaha memahami struktur

masyarakat modern barat yang sangat berbeda dengan struktur masyarakat di belahan bumi lainnya. Menurutnya masyarakat barat semakin terasionalisasi dimana sistem otoritas dimasyarakat ini semakin mengacu pada sistem legal-rasional, sementara pada belahan bumi lainnya sistem otoritas yang berkuasa adalah sistem yang tradisional dan kharismatik (Weber dalam Ritzer, 1996: 32). Menurut pandangan ini sistem legal-rasional mampu memberdayakan masyarakat secara lebih demokratis dan dengan demikian mendorong masyarakat barat kearah modernitas secara maksimal. Menurut Weber pada akhirnya rasionalisasi akan diterima oleh seluruh masyarakat dunia dan sistem legal-rasional akan sepenuhnya menggantikan sistem tradisional dan kharismatik.

Rasionalisasi sendiri hadir dalam berbagai bentuk. Pembentukan berbagai institusi hukum, pasar, perusahaan, dan birokratisasi pemerintahan adalah contoh dari rasionalisasi. Seluruh sistem tersebut diatur dengan prinsip-prinsip yang impersonal dan amoral (Cohen dalam Turner, 2006: 499). Contoh lain dari rasionalisasi ini adalah birokratisasi produksi barang dan penggunaan parhitungan akuntansi yang sistematis untuk mengkalkulasi keuntungan, kehadiran monotheisme yang menggantikan sihir, dan juga kemunculan berbagai partai dan sistem representasi dalam politik yang menggantikan kepemimpinan tradisional dan kharismatik (Bruce dkk, 2006: 255). Kehadiran lembaga pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini yang sistematis, amoral, dan impersonal dengan demikian adalah gambaran dari masyarakat yang terasionalisasi.

Menariknya Weber juga berpendapat bahwa rasionalisasi ini memiliki batasan-batasan yang

ditentukan oleh moral (substansi) kecuali pada kapitalisme. Rasionalisasi sistem hukum misalnya selalu didasarkan pada aksioma-aksioma moral yang mendasar. Kinerja birokrasi yang rasional juga selalu dievaluasi secara moral (Cohen dalam Turner, 2006: 499). Rasionalisasi sistem pendidikan dengan demikian adalah rasionalisasi yang juga memiliki batasan moral sesuai dengan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sistem pendidikan Indonesia misalnya tidak mengajarkan pernikahan sesama jenis sebagai suatu fenomena yang emansipatif karena ini tidak sesuai dengan moral dan nilai yang berlaku di Indonesia.

Rasionalisasi memang memiliki batasan moral atau nilai, akan tetapi harus diingat juga bahwa nilai dan moral dalam masyarakat tidaklah statis melainkan dinamis dan dialektis. Nilai dalam masyarakat Amerika Serikat pada masa lalu menolak dengan keras hubungan sesama jenis akan tetapi kini nilai tersebut telah berubah. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Terkait dengan pembahasan dalam artikel ini penulis melihat bahwa terdapat perubahan nilai dalam masyarakat yang memungkinkan populernya sistem pendidikan usia dini.

Rasionalisasi masyarakat menurut Karlberg dapat terwujud dalam empat jenis, antara lain:

1. Rasionalisasi formal, dimana masyarakat menentukan bagaimana mereka mengorganisasi diri mereka dan merumuskan sistem atau lembaga untuk mencapai tujuan mereka melalui pertimbangan yang efektif dan efisien
2. Rasionalisasi teoritis, dimana masyarakat mengembangkan usaha kognitif untuk

mengembangkan berbagai konsepsi dan teori yang aplikatif atau mempermudah mereka mencapai tujuan

3. Rasionalisasi praktis, dimana masyarakat mengembangkan perilaku pragmatis dan egoistik untuk mengatasi permasalahan sehari-hari dilingkungan mereka
4. Rasionalisasi substantif, dimana masyarakat mengembangkan, merubah, atau memilih nilai-nilai yang kemudian mendukung usaha mereka dalam mencapai suatu tujuan

Masyarakat modern yang terasionalisasi mengalami keempat jenis rasionalisasi ini termasuk rasionalisasi yang terjadi didalam sistem pendidikan anak usia dini. Keempat jenis rasionalisasi yang berkembang dalam sistem pendidikan ini nantinya menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya terasionalisasi, tapi juga telah terkomersialisasi dan terindustrialisasi.

Rasionalisasi Formal dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Rasionalisasi formal dalam pendidikan anak usia dini terlihat dalam pembentukan struktur formal yang birokratis dalam berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Pada masa lalu pendidikan anak usia dini lebih banyak dilakukan didalam rumah oleh orang tua (ibu) dari sang anak. Model pembelajarannya tentu tidaklah terstruktur dan sistematis. Seorang ibu dalam model pendidikan ini adalah seorang pengajar amatir yang tidak memperoleh bayaran atau mungkin perlindungan hukum yang memadai. Sebaliknya model pendidikan usia dini pada masa sekarang telah jauh berubah. Seorang ibu tidak lagi punya peranan

penuh dalam pendidikan anak, sebaliknya ia menyerahkan peranannya tersebut pada berbagai lembaga profesional pendidikan anak. Pada model ini pendidikan anak usia dini memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Terlembaga dan profesional
2. Terdapat sistem penggajian yang jelas
3. Terdapat suatu kurikulum atau model pembelajaran yang sistematis
4. Menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang telah direncanakan, dan
5. Dipayungi oleh hukum

Pendidikan usia dini pada saat ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga profesional yang memang terlatih dalam menyelenggarakan pendidikan usia dini. Secara formal pemerintah bahkan telah merumuskan jenis-jenis lembaga penyelenggara pendidikan usia dini. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 28 jenis lembaga ini antara lain:

- a. Pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat
- b. Pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, dan
- c. Pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan

Pasal tersebut memayungi pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga, akan tetapi menariknya KB dan TPA tampaknya mengalahkan popularitas dari pendidikan didalam keluarga. Terdapat kecenderungan bahwa KB dan TPA selaku pelaksana nonformal pendidikan anak usia dini

dianggap sebagai profesional sehingga orang tua lebih mempercayai mereka ketimbang mendidik anak mereka secara mandiri. Inilah yang kemudian disebut sebagai formalisasi dan profesionalisme pendidikan anak usia dini.

Dampak dari profesionalisme pendidikan anak usia dini adalah lahirnya suatu profesi baru, yaitu pengajar/pengasuh anak usia dini yang memiliki keilmuan dan pengalaman dalam mendidik anak usia dini dan mencari nafkah dari mengasuh/mendidik anak usia dini tersebut. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pola pengasuhan/pendidikan masa lalu dimana seorang ibu adalah pengasuh/pendidik anak amatir yang tidak mendapat bayaran dari mendidik anak-anak mereka. Konsekuensi lanjutan dari aspek ini tentu adalah berubahnya model pendidikan anak yang sifatnya personal dan nonkomersial menjadi impersonal dan komersial. Pendidikan anak usia dini akhirnya menjadi bisnis baru.

Profesionalisme juga menuntun pola pendidikan/pengasuhan menjadi lebih sistematis dengan berbagai perencanaan pengajaran yang didasarkan pada teori-teori pengajaran yang mutakhir. Rencana pembelajaran, satuan acara pembelajaran, kurikulum, dan instrumen ajar lainnya menjadi suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan anak profesional. Hal ini tentu berbeda dengan model pembelajaran di masa lalu yang tidak sistematis.

Selain kurikulum yang tidak kalah pentingnya adalah munculnya berbagai sara pembelajaran bagi anak. Mainan, kuis, dan aktifitas fisik yang dulu diberikan pada seorang anak untuk membahagiakan anak tersebut kini dianggap sebagai sarana dan prasarana pengajaran yang diberikan untuk

mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

Terakhir, secara legal formal pendidikan anak usia dini telah dipayungi hukum yang memadai, yaitu tertuang dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan,

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Marusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Pendidikan anak usia dini juga dilindungi oleh UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 4 dan 9 Ayat 1. Pasal 4 mengatakan, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sementara itu Pasal 9 Ayat 1 mengatakan, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Berdasarkan seluruh pasal tersebut maka lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini memiliki landasan yuridis yang kuat.

Rasionalisasi Teoritis dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Profesionalisasi pendidikan anak usia dini menyebabkan konsekuensi pada tipe rasionalisasi lainnya, dalam hal ini teoritis. Setelah pendidikan anak usia dini terlembaga dan profesional maka berikutnya tampil berbagai kajian, filosofi, dan teori mengenai pendidikan anak. Kajian, filosofi, dan teori ini berbicara mengenai berbagai hal, akan tetapi umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu menemukan cara untuk mendidik anak seefektif dan seefisien mungkin.

Teori-teori pendidikan anak sendiri sebagian besar dirumuskan oleh para psikolog yang kemudian digunakan oleh banyak sekolah usia dini sebagai metode pembelajaran mereka. Teori-teori ini sebagian besar juga telah lama dirumuskan, akan tetapi baru pada masa popularitas pendidikan anak usia dini meningkat teori-teori ini kemudian diangkat diluar dunia keilmuan psikologi. Filosofi atau teori pendidikan anak usia dini yang cukup dikenal dan populer di Indonesia antara lain:

1. Filosofi pendidikan Islam

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar didunia teori pendidikan Islami adalah salah satu teori/filosofi yang paling populer digunakan oleh berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Umumnya filosofi ini digunakan oleh berbagai lembaga pendidikan Islami. Filosofi ini mengacu pada ajaran yang tertuang dalam Al Qur'an, sunnah nabi muhammad, dan juga perilaku para sahabat nabi yang dideduksi dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan anak. Sasaran dari penggunaan teori ini adalah mencapai anak yang tidak hanya cerdas dan

- berwawasan namun juga religius dan islami
2. Pendekatan Montessori
Pendekatan Montessori juga merupakan salah satu pendekatan yang populer digunakan oleh berbagai sekolah, terutama oleh sekolah-sekolah yang berhaluan nasional dan internasional. Pendekatan Montessori berusaha memaksimalkan seluruh kemampuan dan perkembangan anak melalui stimulasi-stimulasi yang telah dirancang secara sistematis.
 3. Pandangan Ki Hajar Dewantara
Walaupun kurang dikenal oleh dunia luar pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sangatlah populer di Indonesia dan telah menjadi kebijakan resmi dari sistem pendidikan nasional. Pandangan ini juga digunakan secara penuh oleh sekolah-sekolah negeri. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai sistem pendidikan ini termuat dalam semboyan "*ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*" yang memiliki arti "di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan".

Ketiga teori pendidikan ini beserta teori-teori yang lain, walaupun muncul pada masa yang berbeda-beda, diangkat dan digunakan secara penuh dalam berbagai sistem pendidikan usia dini. Teori-teori tersebut tidak hanya menawarkan cara yang berbeda-beda dalam mendidik anak, namun juga capaian yang berbed-beda sesuai

dengan keinginan dari orang tua. Ini adalah gambaran nyata dari rasionalisasi teoritik yang terjadi dalam dunia pendidikan usia dini.

Rasionalisasi Praktis dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Seiring dengan profesionalisme pendidikan anak usia dini maka konsekuensi lain yang muncul adalah penekanan pada efektifitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pada masa lalu tidak ada kalkulasi yang terlalu penting dari seorang ibu saat mendidik anaknya dirumah. Seorang ibu mungkin tidak terlalu banyak berfikir apakah membelikan mainan atau makanan kecil ke anaknya berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan si anak. Motivasi utama mereka mungkin hanyalah ingin melihat anaknya senang dan bahagia. Sebaliknya, pada masa kini lembaga profesional pendidikan anak usia dini melakukan kalkulasi secara detail mengenai segala tindakan mereka pada si anak. Seorang anak mungkin mendapatkan banyak sesi permainan, renang, kuis, dan hal menyenangkan lainnya, akan tetapi itu semua telah dikalkulasi secara detail. Apabila tindakan tersebut dianggap tidak efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan pendidikan maka tindakan tersebut dianggap sebagai tidak praktis.

Rasionalisasi Substantif dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Aspek paling menarik dari perubahan model pendidikan anak usia dini ini adalah munculnya rasionalisasi substantif dari perubahan model tersebut. Pada masa lalu terdapat tekanan sosial dari masyarakat bahwa seorang ibu harus menghabiskan besar waktunya bersama anak demi pendidikan sang anak. Seorang ibu yang bekerja kadangkala mendapatkan

stigma negatif karena dianggap terlalu aktif diluar dan melupakan tanggung jawab utamanya sebagai seorang ibu, yaitu mengurus anak-anaknya. Pada masa sekarang pandangan ini telah banyak sekali berubah. Seorang ibu yang bekerja dan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah tidak lagi mengemban stigma yang negatif. Masyarakat sebagian besar memakluminya dan menganggap hal tersebut sebagai suatu kewajaran. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan pandangan tersebut, akan tetapi yang paling utama mungkin adalah faktor tekanan ekonomi, emansipasi wanita, dan yang paling penting profesionalisasi pendidikan anak usia dini.

Walaupun masih jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara maju akan tetapi angka partisipasi kerja perempuan Indonesia terus meningkat. International Labour Organization (ILO) pada tahun 2014 mengatakan bahwa partisipasi angkatan kerja Indonesia meningkat karena peningkatan jumlah perempuan di perkotaan yang masuk dalam angkata kerja. ILO sendiri dalam laporan yang sama menunjukkan bahwa kesenjangan antara pekerja laki-laki dan perempuan masih mencolok dimana laki-laki mencapai angka sebesar 85,0 persen dan perempuan mencapai 53,4 persen pada Februari 2014 (ILO. (2014). *Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014*. Dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_329870.pdf. Diunduh pada tanggal 7 Maret 2014 pukul 14.00 WIB). Pada laporan tersebut kesenjangan memang masih ada akan tetapi angka itu sendiri menunjukkan bahwa pekerja perempuan Indonesia memiliki angka yang besar dengan tren yang meningkat.

Perkembangan jumlah pekerja perempuan ini tentu merupakan gambaran dari tekanan ekonomi yang semakin meningkat dimana sebuah keluarga modern akhirnya membutuhkan seluruh orang tua untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perkembangan angka ini juga cerminan dari penerimaan masyarakat mengenai pekerja perempuan yang semakin besar. Artinya, walaupun gerakan emansipasi wanita di Indonesia tidak sesukses di negara-negara barat, ada tren bahwa emansipasi wanita dalam dunia kerja semakin diterima oleh masyarakat. Tekanan ekonomi dan emansipasi wanita ini pada akhirnya merubah banyak penilaian masyarakat mengenai perempuan yang bekerja. Masyarakat menjadi lebih permissif atau bahkan mendukung perempuan yang bekerja.

Penerimaan masyarakat ini kemudian dipertegas dalam dunia pendidikan anak yang berangsur-angsur memandang berbagai lembaga pendidikan anak usia dini sebagai lembaga yang profesional. Masyarakat menjadi semakin yakin mengizinkan seorang ibu untuk bekerja karena sang ibu ini telah bertanggung jawab pada anaknya dengan menyerahkan pendidikan mereka pada lembaga yang profesional dalam mendidik anak. Keraguan terakhir mengenai sistem baru ini segera hilang saat masyarakat melihat profesionalitas, proses ilmiah, dan hasil optimal yang dicapai oleh lembaga pendidikan anak usia dini.

Hiperrasionalisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Rasionalisasi pendidikan anak usia dini di Indonesia telah terwujud dalam keempat bentuk rasionalisasi. Artinya, agak bergeser dari rasionalisasi Weber yang menitikberatkan pada rasionalisasi formal dan birokratisasi

rasionalisasi pendidikan usia dini ini telah bergerak ke arah yang lebih tinggi yang kemudian dirumuskan oleh George Ritzer sebagai Hiperrasionalisasi. Menurut Ritzer (1996: 441) sistem yang hiperrasional mengkombinasikan dan menghubungkan semua empat unsur rasionalisasi dari Weber, yaitu formal, substantif, intelektual, dan praktis. Sistem ini dipandang lebih rasional daripada sistem rasional sebelumnya yang hanya mengedepankan unsur formal dan tidak dapat mengeksploitasi norma dan nilai masyarakat, memberikan basis intelektual yang cukup, dan memberikan cara praktis untuk memotivasi mereka bekerja secara lebih rasional.

Sistem pendidikan anak usia dini di Indonesia, apabila kita mengacu pada konsepsi Ritzer, telah berkembang menjadi sistem yang sangat efektif dan efisien dimana seluruh metode pembelajaran dirumuskan secara ilmiah dan sistematis. Sistem ini juga menjadi semakin kapitalistik dan industrial dimana pendidikan anak usia dini menjadi suatu bisnis baru yang dijalankan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang kapitalistik. Terakhir, selaras dengan semakin kapitalistiknya sistem ini, pendidikan anak usia dini menjadi wadah komodifikasi baru dimana mereka menjual atau menawarkan janji bahwa jasa mereka dengan imbalan nominal uang tertentu dapat memproses anak mereka menjadi cerdas, pintar, mandiri, berwawasan, dan sholeh.

Kesimpulan

Sistem pendidikan anak usia dini di Indonesia telah berkembang dari sistem yang tradisional menjadi rasional terbirokratisasi dan akhirnya berubah menjadi sistem yang hiperrasional. Perubahan dari sistem yang tradisional

menjadi rasional ini terjadi karena modernisasi dari masyarakat Indonesia sendiri, sedangkan perubahan dari sistem yang rasional menjadi hiperrasional terjadi karena keempat jenis rasionalitas telah dipenuhi oleh sistem pendidikan usia dini di Indonesia. Pendidikan usia dini di Indonesia dengan demikian menjadi sistem yang sangat rasional, efektif, efisien namun juga cenderung kapitalistik.

Daftar Pustaka

- Bryan S. Turner. (2006). *The Cambridge Dictionary of Sociology*, Cambridge University Press, Cambridge
- Ritzer, George. (1996). *Modern Sociological Theory 4th ed*, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York
- Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2013/2014. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Statistik Pendidikan Tahun 2014
- Steve Bruce et al. (2006). *The Sage Dictionary of Sociology*, SAGE Publications, London
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Sumber Internet**
- ILO. (2014). *Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014*. Dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_329870.pdf. Diunduh pada tanggal 7 Maret 2014 pukul 14.00 WIB